

TAJUK RENCANA

Mendorong Petani Lakukan Diversifikasi

SELAMA diterapkannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di DIY, harga sejumlah komoditas pangan di DIY sangat fluktuatif. Meski begitu, secara umum, harga komoditas pangan masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Fluktuasi harga juga dialami pada komoditas cabai dan hingga pekan terakhir terus merosot, bahkan terjun bebas. Petani pun mengalami kerugian.

Bukan sekali ini komoditas cabai mengalami penurunan harga. Namun, sebelumnya komoditas pangan ini harganya juga pernah meroket hingga melampaui harga daging. Saat ini, ketika semua petani cabai memanen secara serentak, terutama di Pulau Jawa, maka harga cabai pun anjlok, karena persediaan barang melimpah. Bila tidak ada intervensi dari pemerintah, maka harga akan semakin turun, sehingga petani makin merugi, karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga produknya.

Tak bisa dipungkiri, hukum ekonomi berlaku pada komoditas pangan jenis ini. Yakni ketika persediaan barang melimpah sementara permintaan tetap, maka dipastikan harganya akan turun. Sebaliknya bila barang terbatas, permintaan tetap atau malah naik, maka akan diikuti dengan kenaikan harga. Hukum ekonomi pasar ini berlaku secara universal.

Melihat fenomena tersebut, agar petani tidak terus merugi, maka harus ada terobosan untuk mengelola produknya agar tetap memberi keuntungan, antara lain melalui diversifikasi. Sebenarnya ini bukan ide baru, melainkan ide lama yang acap tak mudah dijalankan. Petani harus didorong untuk tidak berhenti pada menjual komoditas cabai hasil panen, melainkan perlu melakukan diver-

sifikasi berupa produk olahan cabai, seperti cabai kering, saus atau pasta cabai serta aneka olahan sambal.

Kita mengapresiasi langkah Dinas Pertanian dan instansi terkait yang telah memberi pelatihan kepada para petani atau pemilik lahan untuk melakukan diversifikasi produk pascapanen. Pelatihan semacam ini sangat penting untuk membekali petani ketika mengalami surplus hasil panen. Jangan sampai produk melimpah dan tak mudah diserap pasar sehingga berakibat harga anjlok karena pada akhirnya petani yang rugi.

Pendampingan kepada petani tetap harus dilakukan agar mereka tidak terus merugi, baik untuk produk cabai maupun produk pangan lainnya. Untuk melakukan diversifikasi tentu tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tapi juga instansi lain, terutama perguruan tinggi yang banyak melakukan penelitian seputar produk pertanian, khususnya cabai.

Untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan, keberadaan UMKM tentu sangat penting guna menjembatani kepentingan petani dan konsumen. Kita mendukung pemerintah memberi insentif kepada UMKM yang kini sedang bertahan hidup di tengah pandemi. Namun, tentu saja, pemberian insentif ini harus bersifat edukatif, ibaratnya memberi kailnya untuk mendapat ikan. Misalnya dengan memberi keringanan atau bahkan memutihkan pajak, pinjaman bunga ringan dan sebagainya.

Kita yakin, petani kita sudah tahan banting karena telah mengalami banyak hambatan. Karena itu, dukungan pemerintah serta stakeholder sangat diperlukan agar mereka bangkit dan tidak terpuruk akibat hasil panen tidak terserap maksimal. □

Meredam Gejolak Harga Cabai

Dian Yuanita Wulandari

lak harga cabai. Cabai masih konsisten menjadi komoditas yang mengerek inflasi setiap tahunnya.

Fluktuasi harga cabai dapat menjadi sebab dan akibat. Sebagai sebab, fluktuasi harga turut mempengaruhi keputusan petani untuk memproduksi cabai. Seolah sudah menjadi ritme petani. Jika

merupakan negara produsen cabai terbesar di dunia. Hampir seluruh petani cabai India sudah menggunakan benih varietas unggul yang tahan guncangan iklim dan HPT. Penggunaan varietas ini juga telah mampu mengurangi ketergantungan mereka terhadap pestisida yang ditengarai menjadi salah satu komponen biaya terbesar dari total biaya produksi cabai.

Proyeksi Permintaan

Langkah strategis lain yang sangat fundamental yaitu pemerintah harus serius dalam melakukan proyeksi permintaan dan ketersediaan cabai nasional. Pemerintah perlu membaca pola permintaan baik dari kelompok rumah tangga maupun industri, serta memetakan area produksi secara komprehensif di seluruh pelosok negeri. Proyeksi yang jelas akan menjadi acuan perencanaan yang terukur. Importasi cabai yang dilakukan saat ini di tengah ketersediaan yang surplus menjadi pertanda bahwa pemerintah masih gagap, melakukan proyeksi.

Fluktuasi harga cabai, sudah berlangsung lebih dari satu dekade di Indonesia perlu menjadi bahan pertimbangan seksama. Tentunya dibutuhkan harmonisasi dan kerjasama multipihak agar harga cabai tidak lagi bergejolak. □

*) Dian Yuanita W, Mahasiswa Magister Manajemen Agribisnis UGM, Peneliti Agribisnis, Awardee LPDP RI, dan Anggota Asosiasi Logistik Indonesia.



KR-JOKO SANTOSO

harga cabai anjlok, umumnya petani enggan memproduksi cabai dalam jangka waktu tertentu yang pada akhirnya mendisrupsi ketersediaan cabai di pasar.

Sebagai akibat, fluktuasi harga dapat terjadi akibat dari faktor tertentu. Di antaranya, dipengaruhi faktor pembatas seperti iklim, musim, serta hama dan penyakit tanaman (HPT). Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengganggu keberhasilan produksi cabai. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan dan adopsi benih varietas cabai unggul dapat menjadi solusi.

Indonesia perlu belajar dari India yang

Relevansi Strategi Besar Ekonomi Indonesia

RA Eltribakti

PRESIDEN Joko Widodo menggagas strategi besar ekonomi Indonesia yang terdiri dari hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan ekonomi hijau. Apakah strategi tersebut relevan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia?

Hilirisasi industri sudah digaungkan sejak lama, namun prosesnya berjalan lambat. Meski kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dominan hingga 19,88% pada 2020, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan kontribusi tahun 2010 yang mencapai 22,04%. Melambatnya kontribusi sektor industri ini diduga karena masih berkuat pada sektor hulu, seperti *crude palm oil* (CPO), minyak mentah, dan logam dasar. Harapannya ke depan dapat meningkatkan nilai tambah dengan mengeksport produk turunannya.

Namun ternyata tidak mudah untuk dapat menghasilkan produk industri hilir komoditas-komoditas tersebut. Tantangan besar berasal dari negara-negara tujuan ekspor karena mereka mendapatkan harga lebih tinggi. Hal ini terbukti dari penolakan banyak negara terhadap kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah oleh Pemerintah RI. Pemerintah harus berani untuk tetap memperjuangkannya, meski harus berhadapan dengan *World Trade Organization* (WTO).

Platform Digital

Terkait digitalisasi UMKM, Presiden menyampaikan sudah terdapat 15,5 juta dari 60 juta UMKM yang sudah merambah platform digital. Rendahnya keterlibatan UMKM dalam platform digital dapat terjadi karena kurangnya literasi. BPS mencatat, indeks pembangunan teknologi Indonesia 2020 masih rendah, yakni 5,59 pada skala 1-10. Dari ketiga subindeks pembentuknya (akses dan infrastruktur, penggunaan, keahlian), subindeks penggunaan yang paling rendah (5,34). Sedangkan hasil survei *e-com-*

merce (2019) menunjukkan sebagian besar *e-commerce* adalah UMKM dengan kendala utama, kurangnya permintaan barang/jasa. Dapat disimpulkan bahwa tidak cukup hanya mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Namun perlu membantu agar produknya dapat diserap pasar.

Pemerintah telah berupaya mendorong produksi energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan ekonomi hijau. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi EBT sekitar 442 GW yang terdiri dari tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, panas bumi, maupun biomassa. Dari potensi 442 GW tersebut, baru terpasang 9,32 GW.

Catatan BPS, pemanfaatannya hanya sebanyak 7,05%, menurun dibandingkan pemanfaatannya pada 2014 yang mencapai 13,95%. Menurut Kementerian ESDM, minimnya pemanfaatan EBT karena tingginya biaya produksi serta kurangnya dukungan industri dalam negeri terkait komponen pembangkit EBT. Kendati demikian pemerintah telah melakukan banyak aksi untuk mendorong produksi dan pemanfaatan EBT. Di antaranya kebijakan campuran bahan bakar nabati (BBN) ke bahan bakar minyak (BBM), pemberian insentif fiskal, dan lain-lain. Dukungan publik untuk meningkatkan pemanfaatan EBT juga sangat diperlukan.

Strategi besar ekonomi Indonesia akan sangat berdaya guna bila dapat dilakukan secara terintegrasi. Sebagai contoh, program hilirisasi industri didorong bukan hanya bagi perusahaan besar, namun juga UMKM sesuai kapasitasnya. Penolakan

negara tujuan ekspor barang mentah justru dijadikan momentum untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan dukungan pemerintah dalam berbagai penelitian.

Dikampanyekan

Platform digital yang dikembangkan pemerintah dan swasta seharusnya dikampanyekan secara masif baik. Baik di dalam negeri maupun luar negeri sembari membina UMKM untuk berinovasi produk menyesuaikan kebutuhan pasar, berdaya guna dan berdaya saing tinggi. Infrastruktur pendukung distribusi dan transportasi juga harus semakin efisien sehingga mampu menarik minat UMKM untuk semakin produktif.

Upaya hilirisasi dan digitalisasi tersebut sebaiknya didorong untuk memanfaatkan EBT yang pada tahap awal perlu subsidi pemerintah. Sangat menarik jika masyarakat dapat dilibatkan dalam peningkatan kapasitas EBT untuk membangun semangat dari kita, oleh kita dan untuk kita. □

*) RA Eltribakti MSiKepala BPS Kabupaten Gunungkidul

Pojok KR

Ekonomi bergerak setelah vaksinasi mencapai 80 persen.

-- Sekarang juga bergerak tapi lambat.

PTM terbatas, KPAI wanti-wanti jangan sampai muncul klaster baru.

-- Kuncinya pada kedisiplinan menerapkan proses.

Okupansi perhotelan dan restoran di DIY masih terpuruk.

-- Saatnya bangkit, tapi bertahap.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Masa Darurat Belajar

SAAT ini keadaan mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu dibutuhkan kesabaran dalam menyikapi, dikarenakan butuh adanya pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran virus. Pembelajaran dan interaksi berjalan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan model Distance Learning.

Pemerintah, sekolah, guru, pegawai, siswa, orangtua, pengawas dan masyarakat harus bersatu padu dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, agar berjalan sesuai harapan UU No 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional.

Maka dalam situasi darurat pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dan SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat

Penyebaran Covid-19.

Untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, maka muncullah Pelaksanaan Pembelajaran Belajar dari Rumah (BDR) dengan virtual melalui Zoom Cloud Meeting, Google Meeting, webex, What App dan lain-lain.

Kendala dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini SDM belum siap sepenuhnya, guru maupun tenaga pendidik belum menguasai komputer/aplikasi android, sarana belum memadai, akses internet belum merata/signal susah, dan keterbatasan kuota.

Karena itu perlu adanya penguatan SDM melalui banyak pelatihan dan penguatan. Melengkapi sarana baik melalui televisi maupun media sosial yang berfungsi untuk pembelajaran, informasi dan komunikasi. Memperkuat jaringan internet, karena jaringan internet sangat mendukung kesuksesan pembelajaran jarak jauh. Subsidi Gratis dikhususkan pada sektor pendidikan dan kependidikan segala jenjang. □

*) Faqih Shomadi, Kasi PAIS Kementerian Agama, Gunungkidul.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gung Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo S.Sos.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandarkr@yahoo.com, iklandarkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Supranto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.